BAB II

GAMBARAN UMUM KPP BANDUNG BOJONAGARA

2.1 Sejarah Singkat KPP Bandung Bojonagara

Perkembangan Perpajakan Indonesia timbul sejak zaman Penjajahan Belanda. Pada umumnya masalah pemungutan Pajak ini dilakukan oleh suatu badan yang bernama "De Inspectie Van Vinancia" yang dipimpin oleh Cornelis De Houtman. Tugas dari badan ini adalah mengurus masalah pemungutan atau pemasukan pajak yang dilakukan secara paksa terhadap rakyat. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku pada masa itu.

Kemudian pada masa penjajahan Jepang, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1943 "De Inspectie Van Vinancia" diganti oleh suatu badan yang bernama "Zaimbu". Tugas dari badan ini adalah tetap yaitu memunggut pajak.

Pada waktu Agresi Militer Belanda pada tahun 1947, dimana Belanda menguasai daerah sebelah utara dan Republik Indonesia berada disebelah selatan kota Bandung. Maka inspeksi keuangan Bandung dipindahkan ke arah selatan dengan batas rel kereta api, dengan demikian pasukan Indonesia menjadi mundur ke arah selatan, tidak ketinggalan personil administrasi kantor inspeksi keuangan Bandung pun ikut pindah ke daerah perang, tetapi karena Belanda menyerang terus ke daerah dalam kekuasaan Republik Indonesia maka Laskar RI dipindahkan ke Tasikmalaya, secara otomatis kantor inspeksi keuangan Bandung inipun pindah ke Tasikmalaya.

Dengan terjadinya peristiwa tersebut maka timbul perbedaan paham sehingga terdapat dua kelompok yaitu:

1. Kelompok yang menganut *System Cooperative*

   Kelompok ini melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda dan Tasikmalaya.

2. Kelompok yang menganut *System Non Cooperative*

   Kelompok ini tidak mau kerjasama dengan pemerintah Belanda sehingga memisahkan diri dan pindah keTasikmalaya.

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda ke-II pada tanggal 9 Desember 1947, dimana terjadinya penyerbuan terhadap Pemerintah RI yang bertempat tinggal di Yogyakarta dari Tasikmalaya maka dibubarkan. Sedangkan yang aktif bekerja pada masa itu adalah Lembaga Keuangan yang berada di Bandung dan menganut *System Cooperative*.

Pada tanggal 17 Desember 1949, R. Racmat Jocsocf ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung kemudian Kantor Inspeksi Keuangan Bandung diganti kantor Inspeksi Bandung dimana Inspeksi ini berada disebuah Direktorat Jenderal Pajak serta dalam lingkungan Departemen Keuangan. Hal itulah yang menjadi titik tolak dari permulaan kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur.

Pada tanggal 1 Januari 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

   Yang bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta (bypass)

2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur

Yang bertempat tinggal di Gedung Keuangan Negara Jl.Asia Afrika No.114 Bandung tetapi sekarang berkedudukan di Jl. Kiaracondong No.372 Bandung. Sekarang ditambah lagi dengan Inspeksi Pajak Bandung tengah yang bertempat di Jl. Purnawarman 21 Bandung , berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.48/KMK/01/1988.

Pada tanggal 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia diubah menjadi "Kantor Pelayanan Pajak" begitu pula dengan Kantor Inspeksi Bandung Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.267/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989

Istilah Kantor Inspeksi dibagi tiga yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak

Semua permasalahan yang tadinya ditangani oleh Kantor Inspeksi Pajak yang sekarang menjadi tiga bagian, dimana Kantor Pelayanan Pajak akan menangani masalah-masalah pemberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), penagihan pajak dan keberatan serta Pengukuhan Kena Pajak (PKP)

2. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan (UPP)

Unit ini bertugas melakukan pemeriksaaan terhadap keberatan laporan keuangan bagi wajib pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

3. Kantor Penyuluhan Perpajakan (KPP)

Kantor ini bertugas memberikan penyuluhan atau penerangan kepada wajib pajak agar mereka seluruhnya mengetahui hak dan kewajiban warga negara untuk membayar pajak sehingga dalam perkembangan disesuaikan dengan kebutuhan kantor inspeksi pajak, maka sampai pada tahun 1984 menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

Sedangkan kantor unit pemeriksaan dan penyidikan terdiri dari dua unit yaitu:

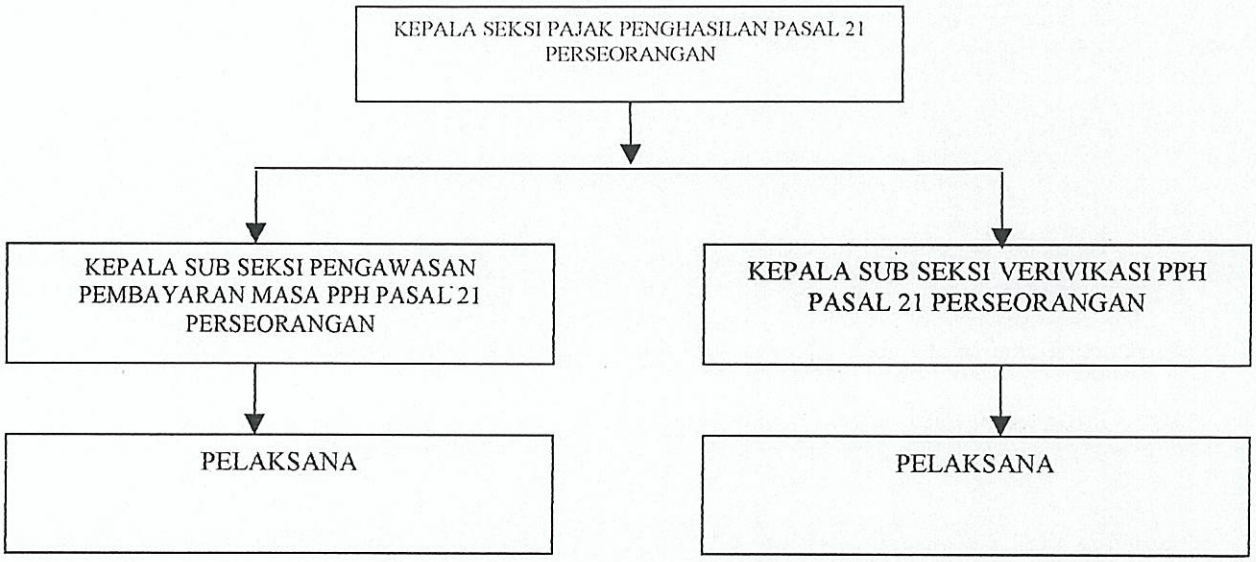
1. Kantor unit pemeriksaan dan penyidikan B1
2. Kantor unit pemeriksaan dan penyidikan B2

Kedua kantor ini bertempat di Jl.Asia Afrika No.114 Bandung, kantor penyuluhan pajak direncanakan akan diadakan disetiap kantor kecamatan.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara

SEKSI PPH PASAL 21

PESEORANGAN



Gambar 1 Seksi PPh pasal 21 Perseorangan

Struktur Organisasi dapat diartikan sebagai pembagian kerja dari suatu instansi atau perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang efektif. Dengan adanya struktur tersebut dapat dilihat bagaimana fungsi kerja atau hubungan kerja serta sejauhmana tanggung-jawab serta wewenang setiap aparatur organisasi yang bersangkutan

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara adalah Kantor Pelayanan Pajak tipe-A KPP Bandung Bojonagara dipimpin oleh seorang kepala sebagai pimpinan yang bertugas sebagai berikut :

1. Mengamankan Penerimaan Pajak Wilayah

2. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang dan kekuasaannya.
   a. Sub Bagian Tata Usaha yang membawahi
      1) Urusan Tata Usaha Kepegawaian
      2) Urusan Keuangan
      3) Urusan Rumah Tangga
   b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi membawahi:
      1) Sub seksi data masukan dan keluaran
      2) Sub seksi pengolahan data dan pengkajian informasi
      3) Sub seksi penggalian potensi dan ekstensifikasi pajak
   c. Seksi Tata Usaha Perpajakan membawahi :
      1) Sub seksi pendataan wajib pajak
      2) Sub seksi pemberitahuan pajak
      3) Sub seksi ketetapan dan kearsipan pajak
   d. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, membawahi :
      1) Sub seksi pengawasan pembayaran masa PPh perseorangan
      2) Sub seksi sertifikasi PPh perseorangan
   e. Seksi Pajak Penghasilan Badan, membawahi:
      1) Sub seksi pembayaran masa PPh badan
      2) Sub seksi verifikasi PPh badan
   f. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak PPh, membawahi:
      1) Sub seksi pengawasan pembayaran masa pemotongan dan pemungut PPh.
      2) Sub seksi verifikasi pemotongan dan pemungut PPh

g. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainya (PTTL), membawahi:

1) Sub seksi PPN Industri
2) Sub seksi PPN Perdaganagn
3) Sub seksi PPN Jasa
4) Sub seksi verifikasi PPNdan PTTL

h. Seksi Penagihan, membawahi:

1) Sub seksi Piutang Pajak
2) Sub seksi Penagihan

i. Seksi Penerimaan dan Keberatan membawahi:

1) Sub seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Retribusi
2) Sub seksi Peksiliasi
3) Sub seksi Keberatan PPh
4) Sub seksi Keberatan PPN dan PTTL

2.3 Deskripsi Jabatan

Uraian tugas di KPP Bandung Bojonagara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak di bidang perpajakan serta pembinaan kelompok tenaga fungsional dalam rangka melaksanakan kebijakan teknis.

Adapun Tugas dan Tanggung-jawab lainnya adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja KPP sebagai pelaksanaan tugas.

b. Mengkoordinasi pelaksanaan kebijaksanaan pendapat dan serta urusan tata usaha, laporan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan dalam rangka melaksanakan tugas pokok.

2. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan

Bertugas mengkoordinasi penyusunan kerja seksi pajak penghasilan Pasal 21.

Seksi ini mempunyai beberapa sub seksi diantaranya :

a. Kepala Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perseorangan.

Bertugas melakukan usaha dan pengecekan surat pemberitahuan tahunan serta memantau dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa pajak penghasilan perseorangan.

b. Kepala sub seksi verifikasi Pajak penghasilan perseorangan

Bertugas melakukan urusan pemantauan verifikasi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan perseorangan wajib pajak yang tidak terdaftar dan tidak dimasukan surat pamberitahuan tahunan.

c. Pelaksana

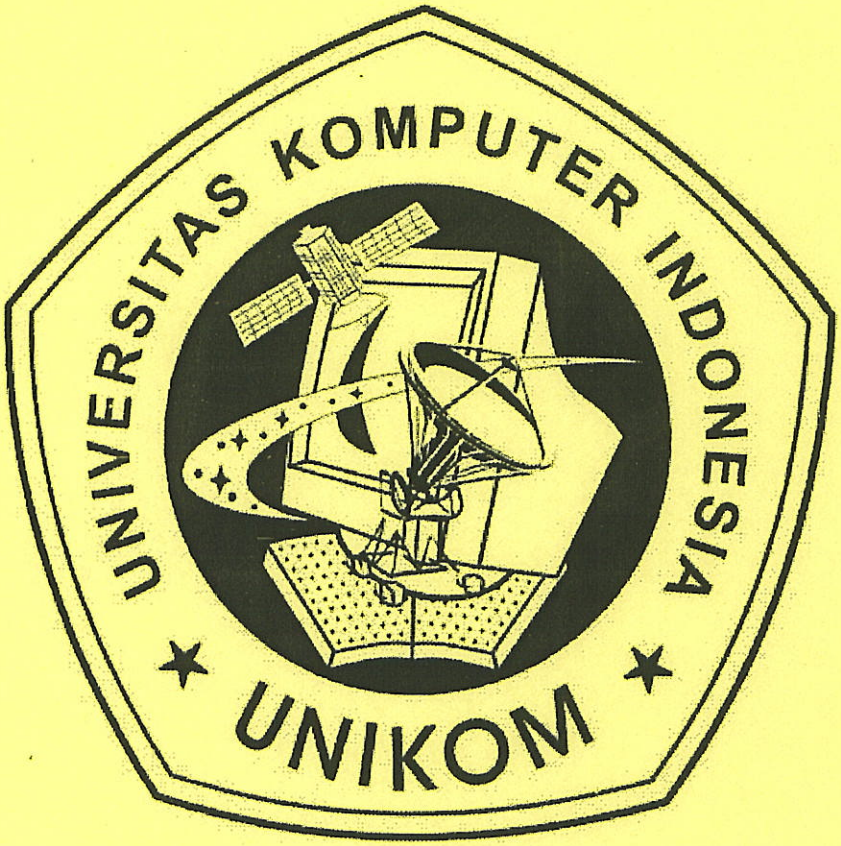
Bertugas membantu Kepala sub seksi masing-masing dimana tempat bekerjanya.

2.4 Aspek Kegiatan KPP Bandung Bojonagara

KPP Bandung Bojonagara mempunyai kedudukan sebagai pelaksana Direktorat Jenderal Pajak, yang berada dan bertanggung-jawab langsung kepada KPP yang dipimpin oleh seorang kepala kantor.

Adapun kegiatan yang dilakukan di KPP Bandung Bojonagara adalah:

1. Kegiatan memantau pelaporan dan pembayaran masa Pajak Penghasilan, PPN, PTLL.
2. Kegiatan pentatausahaan pajak dengan menerima, mengecek, menyortir dan membukukan SPT.
3. Kegiatan urusan tata usaha penerimaan informasi, penagihan, penyelesaian keberatan PPh, PPn, PTLL.
4. Kegiatan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.
5. Kerugian menerima, mentatausahakan dan menyalurkan Surat Setoran Pajak lembar kedua dan bukti pembukuan.
6. Kegiatan menerima berkas surat/dokumen wajib pajak selama tahun berjalan dan disimpan.
7. Kegiatan pembukuan pembayaran masa surat pemberitahuan PPh orang pribadi ke dalam buku ekspedisi.
8. Kegiatan membuat uraian penelitian SPT PPh Perseorangan.
9. Kegiatan membuat dan mengeluarkan Surat Teguran bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak yang terutang.
10. Kegiatan membuat dan mengisi Nota Perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM